

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai *Peristiwa Malari dalam Pandangan Para Pelaku Sejarah (Sebuah Kajian Analisis Biografi)*. Kesimpulan tersebut merujuk pada jawaban terhadap masalah penelitian yang telah diajukan pada bab satu. Bab ini juga akan memuat saran atau rekomendasi hasil penelitian ini bagi kepentingan akademik, terutama sebagai bahan ajar di sekolah.

5.1. Kesimpulan

Bergantinya Presiden Indonesia dari Soekarno ke Soeharto membuat fokus kepentingan negara berubah, yakni dari politik ke ekonomi. Soeharto dengan kebijakannya yaitu Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) kemudian dilanjutkan dengan Pembangunan Lima Tahun (Pelita) mencoba untuk membangun kembali ekonomi Indonesia yang sempat terbengkalai pada pemerintahan Soekarno yang terfokus pada politik. Namun kebijakan Repelita dan Pelita tidak bisa dijalankan tanpa ada dana yang menunjang. Untuk mengatasi hal itu, Soeharto mengeluarkan kebijakan baru yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1/1967 dimana negara-negara asing boleh menanamkan investasinya di Indonesia. Jepang merupakan negara paling banyak menanamkan modalnya di Indonesia. Kerjasama Indonesia-Jepang yang terjalin cukup baik berkat peran Soedjono Hoemardani yang merupakan asisten pribadi Soeharto bidang ekonomi ternyata tidak diikuti dengan itikad baik dari Jepang sendiri. Sehingga hubungan tersebut berujung pada dominasi Jepang khususnya dalam bidang ekonomi dan industri di Indonesia.

Harapan bangsa Indonesia dengan adanya kerjasama ini yaitu untuk menstabilkan kembali perekonomian Indonesia. Ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, dimana Jepang malah mendominasi di Indonesia. Masa lalu yang buruk dengan Jepang yang pernah menjajah Indonesia selama tiga setengah tahun memperburuk keadaan. Hal ini diperparah dengan Soeharto yang seolah menutup mata dengan keadaan yang ada. Keadaan ini tentu tidak dibiarkan

begitu saja oleh masyarakat Indonesia yang merasa dirugikan, khususnya mahasiswa. Dikoordinasi oleh Hariman Siregar, mahasiswa Universitas Indonesia yang baru menjabat sebagai Ketua Dewan Mahasiswa UI. Didukung oleh Sjahrir Sekjen Grup Diskusi Universitas Indonesia (GDUI), Mahasiswa hampir diseluruh Jawa melakukan demonstrasi untuk menentang modal asing di Indonesia.

Ternyata tidak hanya modal asing Jepang yang menjadi sasaran kemarahan massa demonstrasi. Ali Moertopo yang merupakan Asisten Pribadi (Aspri) bidang politik dan Soedjono Hoemardani Asisten Pribadi (Aspri) bidang ekonomi turut terkena kemarahan massa demonstrasi dan mahasiswa. Kedua tokoh ini dianggap mendukung penanaman modal asing di Indonesia sehingga massa menuntut pembubaran Aspri yang merupakan jabatan kedua tokoh ini.

Dalam suasana yang kemelut, Jenderal Soemitro Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) mencoba berdialog dengan para mahasiswa dengan mendatangi kampus-kampus. Hal ini membuat mahasiswa seolah mendapat dukungan dari elit militer untuk melancarkan demonstrasi. Walaupun dalam memoarnya sendiri Soemitro menegaskan bahwa saat itu ia sebagai Pangkopkamtib melarang adanya demonstrasi.

Soemitro sendiri yang menjabat sebagai Pangkopkamtib dari awal tahun 1971 sudah beberapa kali menyarankan Soeharto untuk membubarkan Pangkopkamtib, Opsai Khusus (Opsus), dan Aspri. Hal ini dilakukan Soemitro karena menurutnya ketiga badan ini merupakan sebuah kreasi untuk saat-saat yang *ekstra-ordiner* dan *ekstra-struktural*. Dengan berhasilnya Pemilu tahun 1971 menandakan kondisi politik sudah kembali stabil sehingga Soemitro merasa sudah waktunya untuk kembali pada kehidupan institusional. Namun Soeharto menolak saran dari Soemitro seolah-olah badan-badan tersebut masih dibutuhkan, khususnya Aspri dan Pangkopkamtib. Instuisi Soeharto ternyata tepat, kedua badan ini memang sangat dibutuhkan pada situasi kritis saat terjadinya Malari.

Kedatangan Soemitro ke kampus-kampus yang seakan memberi angin segar pada mahasiswa membuat Hariman Siregar tidak segan pada Soemitro. Hariman kerap kali mengunjungi kantor Kopkamtib untuk bertemu Soemitro dan mendiskusikan mengenai keberatan mahasiswa dengan dominasi Jepang di Indonesia. Hal ini diikuti dengan kedekatan Ali Moertopo dan Soedjono

Hoemardani dengan Presiden Soeharto yang memang kedua tokoh ini merupakan Asisten pribadi Presiden. Karena hal ini, kemudian munculah isu yang mengatakan adanya permusuhan antara Soemitro dan Ali Moertopo. Soemitro yang mencoba mendapat dukungan dari mahasiswa dan Ali Moertopo yang mendapat dukungan dari Soeharto.

Hanya saja, hal ini dibantah oleh Soemitro sendiri, dalam biografinya Soemitro mengatakan bahwa kedatangannya ke kampus-kampus bukan untuk mendapat dukungan dari mahasiswa agar ia dapat naik menjadi Presiden. Mengingat pada saat itu, terjadi penggulingan Marsekal Thanom Kittikachorn pada bulan Oktober 1973 di Thailand oleh para mahasiswa. Soemitro menegaskan dalam biografinya bahwa kedatangannya ke kampus-kampus itu adalah atas perintah Soeharto untuk menenangkan para mahasiswa agar tidak terjadi demonstrasi.

Sedangkan Ali Moertopo sendiri dianggap sebagai dalang dari peristiwa Malari, dimana ada organisasi dibawah Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani, anggota-anggota dalam organisasi tersebut merupakan orang-orang eks DI/TII dan GUPPI (Gerakan Usaha Perbaikan Pendidikan Indonesia). Kemudian saat terjadinya peristiwa Malari, lewat organisasi tersebut Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani melakukan pengarahannya massal lewat Ramadi dan Kiai Nur dari Banten. Massa diarahkan untuk merusak mobil Jepang, kantor Toyota Astra dan Coca-cola. Kegiatan tersebut dilakukan untuk merusak citra mahasiswa dan memukul duet Soemitro-Sutopo Juwono

Hariman Siregar yang merupakan Ketua DMUI dan Sjahir sebagai Sekjen GDUI mengatakan bahwa peristiwa Malari bukan tujuan mereka. Karena tujuan awal tokoh-tokoh mahasiswa tersebut adalah murni demonstrasi menentang modal asing dan pembubaran Aspri.

Keenam tokoh ini memberikan keterangan yang berbeda mengenai bagaimana peristiwa 15 Januari terjadi. Begitupun dengan pandangan mereka terhadap peristiwa tersebut. Ali Moertopo memandang Peristiwa Malari sebagai upaya Soemitro untuk menjatuhkan kekuasaan Soeharto. Sedangkan Soemitro sendiri memandang Peristiwa Malari sebagai upaya Ali Moertopo untuk merusak dan menjatuhkan namanya. Jika melihat hal ini, dapat disimpulkan bahwa terjadi

permusuhan antara dua tokoh militer tersebut, dan hal inilah yang disebutkan dalam artikel yang diterbitkan dalam *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah* berjudul Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Peristiwa Malapetaka 15 Januari (MALARI) 1974 dan skripsi berjudul *Rivalitas Soemitro dan Ali Moertopo dalam Kancah Perpolitikan di Indonesia 1971-1974* ditulis oleh Iin Farida Astutik (2006), mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang sebagai salah satu faktor terjadinya Peristiwa Malari.

Selain kedua tokoh ini, yaitu Ali Moertopo dan Soemitro, keempat tokoh lainnya pun memiliki pandangan yang berbeda mengenai Peristiwa Malari. Seperti Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai presiden memandang Peristiwa Malari sebagai tantangan besar yang harus dihadapi pada awal kepemimpinannya. Malari bagi Soeharto adalah kerusuhan anti-Tanaka pada 15-16 Januari 1974, yang dipicu oleh dua masalah yang dihadapi Orde Baru yaitu makin meluasnya kemarahan masyarakat atas meningkatnya usaha dagang Jepang yang berlebihan di Indonesia dan pertarungan dua kelompok dalam Angkatan Darat yang makin meluas untuk mendapatkan perhatian Soeharto- dan mungkin saja- posisinya.

Berbeda dengan Soeharto. Soedjono Hoemardani justru memandang Peristiwa Malari sebagai kerusuhan massa dalam menentang modal asing dan adanya Asisten Pribadi. Padahal Soedjono Hoemardani sendiri pada saat itu menjabat sebagai Asisten Pribadi (Aspri) Presiden bidang ekonomi. Soedjono Hoemardani juga merupakan tokoh yang berperan dalam terjalinnya hubungan ekonomi antara Indonesia-Jepang. Dimana hubungan Indonesai-Jepang ini adalah cikal bakal dominasi Jepang di Indonesia. Oleh karena itu, Soedjono Hoemardani dianggap sebagai salah satu penyebab dari munculnya dominasi ekonomi Jepang di Indonesia.

Selain para tokoh militer dan politik, dua tokoh mahasiswa pun memiliki pandangan berbeda dengan tokoh-tokoh yang telah disebutkan di atas. Seperti Hariman Siregar yang pada saat itu merupakan Ketua Umum Dewan Mahasiswa UI (DMUI) memandang Peristiwa Malari sebagai puncak dari gerakan kritis terhadap konsep pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Menurut Hariman, Malari adalah puncak kemarahan masyarakat Indonesia

terhadap pemerintahan Orde Baru yang selain adanya dominasi Jepang juga Aspri namun pada saat itu kasus korupsi juga sedang marak terjadi. Tidak jauh berbeda dengan Hariman Siregar, Sjahrir yang pada saat itu merupakan Sekretaris Jenderal Group Diskusi Universitas Indonesia (GDUI), memandang Peristiwa Malari sebagai suatu titik balik atau anti-klimaks dari peran gerakan mahasiswa Indonesia itu sendiri sebagai pengontrol kekuasaan. Sjahrir juga berpendapat bahwa Malari adalah upaya untuk menggiring aktivis, khususnya mahasiswa dan pemuda, sebagai orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas berbagai kerusuhan (*vindalisme* atau *anarkhisme*) yang terjadi.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada beberapa saran atau rekomendasi yang akan disampaikan oleh penulis, di antaranya:

Pertama, penulis mengambil enam tokoh sebagai para pelaku sejarah Peristiwa Malari. Tokoh-tokoh tersebut mencakup tokoh politik, militer dan mahasiswa. Menurut penulis, tokoh-tokoh tersebut belum mewakili bagaimana pandangan terhadap Peristiwa Malari secara menyeluruh. Karena masih banyak pihak yang lain belum dilihat bagaimana pandangannya terhadap Peristiwa Malari, salah satunya tamu negara yang berkunjung ke Indonesia dan menjadi tujuan utama massa melakukan demonstrasi yaitu Perdana Menteri Jepang Tanaka.

Menurut penulis, pandangan dari tokoh tersebut penting untuk dikaji. Melihat menurut Yogaswara dalam bukunya yang berjudul *Dalang peristiwa 15 Januari 1974 (Malari)* disebutkan bahwa ada interpersi asing dalam terjadinya Peristiwa Malari. Yakni oknum-oknum Jepang yang kontra terhadap Perdana Menteri Tanaka dan ingin menggulingkan PM Tanaka dari jabatannya. Sehingga penulis menyarankan atau merekomendasikan untuk penulis selanjutnya yang ingin mengangkat tema yang serupa dengan penulis untuk mengkaji mengenai Pandangan Perdana Menteri Tanaka terhadap Peristiwa Malari.

Terdapat beberapa kekurangan dalam skripsi ini, di antaranya dalam memahami pandangan tokoh, penulis hanya melakukan kajian terhadap buku biografi, autobiografi dan artikel mengenai tokoh terkait. Yakni Ali Moertopo,

Soemitro, Soeharto, Soedjono Hoemardani, Hariman Siregar dan Sjahrir. Bagi peneliti selanjutnya mungkin bisa melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dekat dengan keenam tokoh tersebut, apalagi salah satu tokoh yaitu Hariman Siregar masih hidup sampai sekarang.

Kedua, bagi para pengguna maupun para pembaca hasil penelitian ini, khususnya bagi yang tertarik dalam bidang sejarah Orde Baru. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan khususnya bagi peristiwa-peristiwa bersejarah pada masa Orde Baru. Skripsi ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi siswa SMA yang mempelajari sejarah pada masa Orde Baru. Namun, perlu diketahui bahwa dalam memahami isi dalam skripsi ini, siswa membutuhkan bimbingan dari guru agar tidak salah memahami pemaknaan dari Para Pelaku Sejarah Peristiwa Malari. Perbedaan pandangan dan penafsiran dalam skripsi ini dengan kajian yang lain perlu dimaknai sebagai keanekaragaman sudut pandang dalam penelitian dalam penulisan sejarah. Selain itu, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi mutakhir bagi sejarah Indonesia. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam bidang keilmuan sejarah. Selain itu, penulis berharap skripsi ini dapat memperkaya penulisan karya tulis ilmiah mengenai perkembangan ekonomi Indonesia pada tahun 1974 di lingkungan Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.